



Perkara Penting

Important Cases

Permasalahan Hukum Perdata yang Dihadapi Perusahaan pada 2025

PERURI senantiasa menjalankan seluruh aktivitas usahanya dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sebagaimana entitas bisnis pada umumnya, Perusahaan menghadapi beberapa perkara hukum perdata yang timbul dalam pelaksanaan operasional maupun hubungan kemitraan usaha.

Seluruh perkara hukum perdata tersebut telah ditangani secara profesional dan proporsional melalui langkah hukum yang tepat, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan atas kepentingan Perusahaan. PERURI juga melakukan koordinasi secara intensif dengan penasihat hukum internal dan eksternal guna memastikan penyelesaian perkara berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan dampak material terhadap kelangsungan usaha maupun reputasi Perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum perdata yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, maupun keberlangsungan usaha PERURI. Perusahaan tetap berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penerapan tata kelola yang baik sebagai bagian integral dari integritas korporasi.

Permasalahan Hukum Pidana yang Dihadapi Perusahaan pada 2025

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menghadapi perkara hukum pidana.

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Dampak atas permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan melalui proses hukum tidak bersifat signifikan, mengingat Perusahaan telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan tingkat risiko yang timbul.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Civil Legal Matters Faced by the Company in 2025

PERURI consistently conducts all of its business activities in accordance with applicable laws and regulations. Nevertheless, as with business entities in general, the Company faced several civil legal matters arising from operational activities and business partnership relationships.

All civil legal matters have been handled professionally and proportionally through appropriate legal measures, both through litigation and non-litigation mechanisms, while continuing to uphold the principles of prudence, regulatory compliance, and protection of the Company's interests. PERURI also maintains intensive coordination with internal and external legal advisors to ensure that the resolution of such matters remains within the applicable legal framework and does not result in material impacts on business continuity or the Company's reputation.

As of the end of 2025, there were no civil legal matters that resulted in significant impacts on PERURI's financial condition, operational activities, or business continuity. The Company remains committed to consistently upholding compliance with applicable laws and implementing good corporate governance as an integral part of corporate integrity.

Criminal Legal Matters Faced by the Company in 2025

Throughout 2025, the Company was not involved in any criminal legal matters.

Impact of Legal Matters on the Company

The impact of legal matters faced by the Company through legal proceedings was not significant, as the Company had implemented mitigation measures appropriate to the level of risks arising.

Disclosure of Legal Matters Involving the Supervisory Board and Board of Directors

Throughout 2025, there were no members of the Supervisory Board or Board of Directors who were involved in any legal matters, either civil or criminal.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh entitas anak Perusahaan, baik yang berkaitan dengan aspek perdata maupun pidana.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Sepanjang tahun 2025, PERURI tidak mencatat adanya perkara material di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai entitas, entitas anak, maupun anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Perkara Penting Terkait Dengan Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permasalahan yang timbul antara Perusahaan dengan buruh maupun karyawan.

Disclosure of Legal Matters Involving Subsidiaries

In 2025, there were no legal matters involving the Company's subsidiaries, whether related to civil or criminal aspects.

Important Cases Outside Legal Matters

Throughout 2025, PERURI did not record any material cases outside legal matters involving the Company as an entity, its subsidiaries, or members of the Supervisory Board and Board of Directors.

Important Cases Related to Labor and Employees

Throughout 2025, there were no issues arising between the Company and laborers or employees.

Sanksi Administratif Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material dan berdampak terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Selain itu, tidak terdapat pula sanksi administratif yang dijatuhkan oleh otoritas terkait kepada Perusahaan sebagai entitas, anak perusahaan, maupun kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Throughout 2025, there were no material administrative sanctions that had an impact on the continuity of the Company's business. In addition, there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities on the Company as an entity, its subsidiaries, or members of the Board of Directors and Supervisory Board.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy on Long-Term Performance-Based Compensation for Management and/or Employees

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)

Perusahaan tidak menerapkan Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan (*Employee and Management Stock Option Plan/ESOP-MSOP*). Seluruh modal PERURI atau sebesar 100% tetap dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, informasi terkait kepemilikan saham publik maupun program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan tidak tersedia.

Employee and/or Management Share Ownership Program (MSOP/ESOP)

The Company does not implement a Management and Employee Share Ownership Program (*Employee and Management Stock Option Plan/ESOP-MSOP*). All of PERURI's capital, or 100%, remains owned by the Government of the Republic of Indonesia. Accordingly, information regarding public share ownership or share ownership programs for management and employees is not available.